

PERANCANGAN INTERIOR KANTOR MALL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUMEDANG

¹Muhammad Arif Adhitiya P., ²M. Togar Mulya Raja, S.Ds., M.Ds ³Andreas D. Handoyo, S.T., M.T

Program Studi Desain Interior, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom

Jl. Telekomunikasi Terusan Buah Batu Bandung 40257 Indonesia

¹muhammadarif@student.telkomuniversity.ac.id, ²togarmulyaraja@telkomuniversity.ac.id,
³ashandoyo@telkomuniversity.ac.id

Abstrak - Perlu diketahui, generasi pertama pelayanan terpadu di Indonesia adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA). Kemudian berevolusi menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai generasi kedua. Lalu berdirinya pelayanan terpadu generasi ketiga, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP), yang dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai kantor layanan yang menyediakan pelayanan terpadu, MPP perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan guna dapat tercapainya pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman dalam satu gedung. Perancangan interior Kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang ini merupakan perancangan new design, dengan tujuan untuk menciptakan tata ruang pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan serta suasana ruang yang saling terpadu dengan menciptakan harmoni yang di terapkan pada elemen pembentuk dan pengisi interior. Diharapkan dengan perancangan baru interior MPP tersebut dapat memberikan kemudahan dan membantu pengguna maupun staf agar merasa lebih nyaman ketika berada di MPP Kabupaten Sumedang ini.

Kata Kunci : Kantor MPP, Terpadu, Harmoni, Nyaman

I. PENDAHULUAN

Mengurus surat perizinan yang berhubungan dengan Pemerintah, merupakan hal yang tidak sederhana. Biasanya warga sering berpindah tempat dari kantor satu ke kantor lainnya untuk mengurus banyaknya surat-surat. Untuk memulai suatu usaha saja di Indonesia membutuhkan 12 prosedur yang memakan waktu lama. Oleh sebab itu, PemKab Sumedang memberikan layanan baru untuk memudahkan masyarakat mengurus berbagai persoalan perijinan dan non-perijinan secara terpadu.

Mal Pelayanan Publik merupakan tempat berlangsungnya suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik, yang merupakan perluasan dari sistem pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah,

BUMN/BUMD hingga Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman dalam satu gedung.

MPP Sumedang merupakan MPP yang ke-17 di Indonesia dan ke-2 di Jawa Barat dimana MPP pertama yaitu MPP Kota Bogor. MPP Kab. Sumedang ini memiliki 361 jenis layanan dari 23 instansi berbeda (7 instansi vertikal & SKPD Provinsi, 3 BUMD, 6 BUMN dan 7 SKPD Kabupaten Sumedang). MPP ini berlokasi di Gedung Negara Sumedang Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 Sumedang.

Pelayanan terpadu ini dalam seharinya melayani hingga 632 orang, dengan tiap instansi di batasi antriannya hingga 250 orang dalam satu hari. Fasilitas ini terbagi kedalam 2 lantai, dimana lantai satu terdiri dari 8 loket pelayanan, dan lantai dua terdiri

dari 15 loket pelayanan. Di lihat dari besarnya minat masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut tidak sebanding dengan besaran ruang yang ada, sehingga membuat penumpukan di beberapa ruang tunggu pelayanan pada MPP ini.

Tata letak ruang staf terdepan (pelayanan) dengan staf back office yang terpisah gedung membuat kurang optimalnya kinerja dan pengawasan staf. Serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai seperti sarana tempat penyimpanan berkas sementara, fasilitas loker, ruang rapat, ruang tunggu, ruang mushola dan tempat duduk prioritas, untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan.

Berdasarkan dari data di atas, perancangan baru MPP Kab. Sumedang perlu dilakukan, guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi guna memudahkan masyarakat untuk mendapatkan jasa layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Serta agar dapat mengakomodir seluruh aktifitas, MPP akan di relokasi ke bangunan baru yang memiliki luasan yang lebih mumpuni dan penambahan tiga jenis pelayanan baru. Pendekatan yang di gunakan dalam perancangan MPP ini terkait dengan perilaku pengguna di kantor Mal Pelayanan Publik Kab. Sumedang.

II. LANDASAN TEORI

Pelayanan Publik

Munculnya pelayanan umum berlandaskan adanya beragam kebutuhan, sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan MENPAN No.63/KEPM.PAN/7/2003 kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain :

1. Pelayanan administratif merupakan pelayanan dalam bentuk pembuatan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dokumen yang di maksud antara lain Kartu Tanda Pendudukan

(KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya.

2. Pelayanan barang yaitu pelayanan dalam menciptakan beragam jenis barang yang dapat digunakan oleh publik, seperti jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

3. Pelayanan jasa yaitu beragam bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Berdasarkan studi tentang pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa objek desain merupakan jenis kantor yang memberi pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.

Data Proyek

Nama Objek : Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang

Jam Kerja : Senin – Jumat (08.00 – 15.00)

Kepala Dinas : Drs. H. Ade Setiawan, M.Si.

Alamat : Jl. Prabu Geusan Ulun No.36 Sumedang 45311

Jenis Proyek : Fiktif

Klasifikasi Kantor : Kantor Pemerintahan

Fungsi : Pusat Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non- Perizinan

Orientasi Bangunan: Arah Barat Daya

Luas Lahan : ± 1.904 m²

Luas bangunan : ± 4.322 m²

Luas Terancang : ± 2.306 m²

Orientasi bangunan : Barat Daya



Gambar 2.1.- Lokasi Bangunan MPP Yang Baru

(Sumber: Data Penulis, 2019)

MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan baik itu perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat hingga daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.

Tujuan Mall Pelayanan Publik

- a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
- b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Prinsip Mall Pelayanan Publik

- a. keterpaduan;
- b. berdaya guna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas; dan
- f. kenyamanan.

Modern

Perlu diketahui, layanan terpadu di Indonesia sudah memasuki generasi ketiga yaitu Mal Pelayanan Publik. Mengingat

fungsi fasilitas MPP yaitu sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman dalam satu gedung. Sehingga di pilihlah pengayaan “Modern” ini di karenakan memiliki kesamaan yaitu desain yang polos serta simple menggambarkan cepat dan kemudahan, kemudian prinsip yang mengutamakan fungsi sama seperti tugas fasilitas MPP ini.

III. KONSEP

Konsep Perancangan

Konsep yang dipilih pada perancangan ini. adalah harmoni. Arti dari harmoni sendiri ialah kumpulan dari berbagai macam nada yang menjadi satu kesatuan dan menciptakan sebuah komposisi yang indah. Alasan saya memilih konsep ini karena MPP Kab. Sumedang terdiri dari 26 instansi yang berbeda yaitu 9 instansi vertikal & SKPD Provinsi, 3 BUMD, 7 BUMN dan 7 SKPD Kabupaten Sumedang. 26 instansi ini memiliki latar belakang yang berbeda tetapi dapat menjadi satu kesatuan.



Gambar 3.1.- Konsep Perancangan

(Sumber: Data Penulis, 2019)

Serta tema *Cozy* atau kenyamanan diwujudkan dalam desain yang unik dan berbeda dalam ruang pelayanan dan ruang kerja, dimana masing-masing pengguna memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda, sehingga ruang yang tercipta nyaman untuk digunakan saat beraktifitas.



Gambar 3.2.- Konsep Harmoni

(Sumber: Data Penulis, 2019)

Sistem Sirkulasi

Penerapan sirkulasi pada perancangan kantor ini yaitu sirkulasi dengan pola linier yang merupakan jalan lurus yang dapat menjadi unsur pembentuk utama deretan ruang. Sirkulasi dalam kantor menggunakan tipe koridor terbuka dan susunan interiornya dengan sistem open layout untuk mendukung memaksimalkan unsur komunikatif dan susunan yang fleksibel nan efisien.

Konsep harmony diterapkan dalam sirkulasi dan penataan lay out yang sudah teratur dan juga hubungan antar ruang yang dekat, seperti antara loket dan staf pengawas. Baik antara tempat pemandu, penulisan data, ruang tunggu, loket pengurusan dan staf pengawas saling berhubungan dan saling mendukung. Sama dengan harmoni yang semua nadanya saling berhubungan dan juga saling mendukung satu sama lainnya.

Organisasi Ruang

Dalam konsep organisasi ruang kantor Mal Pelayanan Publik ini terdapat beberapa aspek yang harus disesuaikan dan saling berhubungan. Sehingga pada kantor MPP ini menggunakan organisasi berjenis gabungan, yaitu tata ruang terbuka (open plan offices) jenis tata ruang ini digunakan pada area publik dan semi privat untuk memberikan kemudahan dalam visibilitas dan pengawasan. Sementara untuk area privat menggunakan tata ruang kantor tertutup (close plan offices) sehingga

memberikan rasa privasi yang lebih dan sebagai pembeda ruang kerja.

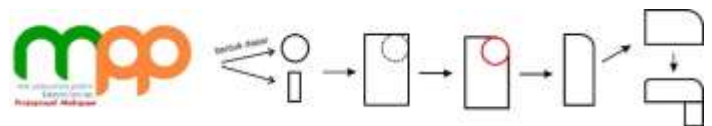
Zooning dan Blocking

Zoning pada lantai satu dan lantai dua merupakan zoning pelayanan publik dan sarana penunjang. Pada lantai 3 terdapat fasilitas tempat makan euang rapat, dan balai nikah serta mini perpustakaan yang dapat di dimanfaatkan oleh pengunjung maupun staf MPP. Pada lantai 4 ini di isi dengan area kerja staf, pelaksana tugas, KaSubBag, Sekretariat dan ruang Kepala Dinas serta fasilitas ruang rapat hingga aula. Dan di lantai 5 (atap) terdapat gudang barang yang tidak terpakai.

Secara blocking bersifat vertikal, guna menunjang responsibilitas pelayanan di lantai satu dan dua. Sehingga departemen yang berhubungan lebih intens dengan pelayanan di tempatkan lebih dekat dengan area pelayanan.

Konsep Bentuk

Bentuk yang dipilih adalah perpaduan bentuk geometris untuk menampilkan bentuk yang sederhana dan efisien seperti bentuk segitiga, persegi panjang dan bujur sangkar. Serta bentuk dinamis untuk memberikan kesan yang tidak kaku/monoton.



Gambar 3.3.- Konsep Bentuk

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2019)

Pada penerapannya bentuk kaku/ geometris di terapkan pada bentukan ruang serta furnitur. Sementara bentuk yang dinamis di terapkan pada elemen estetik seperti hiasan pada dinding dan desain plafon. Beberapa bentuk furnitur menggunakan perpaduan bentuk geometris dan dinamis.



Gambar 3.4.- Konsep Bentuk Plafon

(Sumber: <https://apkpure.com/id/latest-ceiling-design/com.latestceilingdesign.bengeldev>)

Konsep Material

Guna mendukung konsep harmoni, sehingga penggunaan material yang memberikan suasana kebersamaan (hangat) serta berkarakter transparan dan dinamis. Selain itu, penggunaan material yang mudah dibersihkan sangat diperlukan guna memberikan kemudahan dalam *maintenance* kebersihan terutama di area publik seperti di area tunggu dan loket. Material dipilih sesuai standar yaitu aman dan untuk memberi kesan bersih. Beberapa material yang digunakan :



Gambar 3.5. Konsep Material

(Sumber : Data Penulis, 2019)

Konsep Warna

Pada kantor MPP ini, warna digunakan untuk membantu meningkatkan kinerja karyawan dan menghindari rasa bosan bagi konsumen dengan penggunaan warna sebagai penyeimbang cahaya didalam ruang kantor yang bersumber dari cahaya matahari dan buatan. Khususnya untuk memudahkan pengawasan dari karyawan yang tiap harinya memiliki aktifitas yang cukup padat, sehingga masih bisa terlihat meski hanya di bantu oleh pantulan cahaya dari warna tersebut.

Warna yang digunakan dalam perancangan ini adalah perpaduan warna netral seperti putih, abu muda, dan warna aksen hijau, oren, merah, biru yang di dapat dari identitas logo MPP. Konsep harmoni diterapkan dalam perpaduan warna antara muda dan tua. Warna harmony adalah warna yang selaras, yang dimaksudkan dengan warna yang selaras adalah warna yang masih satu rumpun seperti gradasi warna dari dingin ke hangat.



Gambar 3.6. Konsep Warna

(Sumber : Data Penulis, 2019)

Konsep Pencahayaan

Sistem pencahayaan yang digunakan dalam perancangan Kantor MPP yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami bersumber dari cahaya matahari langsung atau *direct daylight* yang didapatkan dipagi hingga sore hari. Kemudian cahaya buatan dengan besaran lux yang di butuhkan adalah 100-500 lux untuk standar kantor.

Alasan penggunaan pencahayaan campuran karena jam kerja kantor yang hanya dari pagi hingga sore sehingga dapat

memanfaatkan pencahayaan alami secara maksimal. Sedangkan pencahayaan buatan sebagai cadangan apabila cahaya alami tidak dapat maksimal.

Konsep Penghawaan

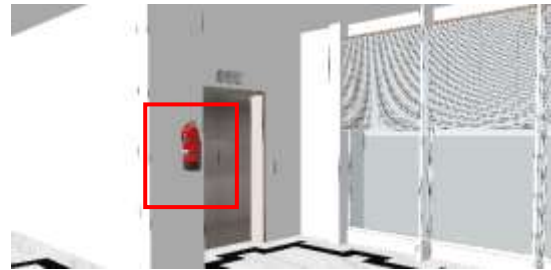
Penghawaan yang digunakan pada Kantor MPP yaitu menggunakan penghawaan alami dan buatan. Penghawaan alami didapat dari bukaan yang terdapat pada bangunan Kantor MPP. Pada Penghawaan buatan menggunakan sistem *air conditioner (AC) central system ceiling mounted cassette* dengan ukuran 1.5pk. Dengan suhu udara yang disarankan untuk kondisi kerja agar terasa nyaman adalah 25,6 °C.



Gambar 3.7. Konsep Penghawaan
 Sumber : Data Penulis, 2019

Konsep Keamanan

Konsep keamanan yang diterapkan pada Kantor MPP terbagi menjadi dua yaitu konsep pencegahan kejahatan dan pencegahan bencana. Konsep pencegahan kejahatan yaitu dengan menerapkan beberapa cctv yang diletakkan pada plafon serta menggunakan beberapa kontrol tambahan seperti sensor pintu dengan menggunakan kartu bagi seluruh pegawai saat sebelum masuk akses zona privat. Dengan penambahan kemanan oleh security yang menjaga kontrol keamanan tersebut. Konsep pencegahan bencana kebakaran yaitu dengan menerapkan APAR yang diletakkan di dinding, *sprinkle* dan *smoke detector* yang diterapkan pada plafon. Kemudian menerapkan *sign system* yang menunjukkan jalan keluar.



Gambar 3.8.- Sistem Keamanan
 (Sumber : Data Penulis, 2019)

IV. HASIL AKHIR



Gambar 4.1.- Denah Khusus 1
 Sumber: Data Penulis, 2019



Gambar 4.2.- Denah Khusus 2
 Sumber: Data Penulis, 2019



Gambar 4.3 Bukaan cahaya pada area taman bermain

Sumber : Dokumen Pribadi



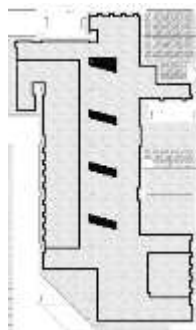
Gambar 4.4. Pencahayaan Buatan Pada Lobi

Sumber : Data Penulis, 2019



Gambar 4.5.- Tampak Denah Khusus

Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar 4.6. Konsep Lantai

Sumber : Data Penulis, 2019



Gambar 4.7. Konsep Dinding

Sumber : Data Penulis, 2019



Gambar 4.8.- Konsep Plafon

Sumber : Data Penulis, 2019



Gambar 4.9.- Desain Pada Loket Pelayanan

V. KESIMPULAN

Perancangan interior Kantor Mal Pelayanan Publik ini di latar belakang oleh tersedianya fasilitas berupa bangunan yang di jadikan sebagai pusat pelayanan publik baik administratif maupun non-administratif di pusat Kota Sumedang. Dimana tempat ini dapat melayani segala kebutuhan publik serta memangkask birokrasi pelayanan. Sehingga pembuatan MPP Kab. Sumedang ini dapat menjadi fasilitas publik yang dapat di dimanfaatkan oleh masyarakat umum secara maksimal

baik dalam kemudahan pelayanan maupun kenyamanan pengguna dalam fasilitas tersebut.

Pada proyek tugas akhir Perancangan Interior Kantor Mal Pelayanan Publik ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca sehingga dapat memberikan sebuah masukan dan perubahan ke arah yang lebih baik dalam fasilitas pelayanan publik.

Daftar Pustaka

Buku

D.K.Ching, Francis. (1999) Arsitektur: Bentuk, Ruang dan Tatanan. Edisi ke-3. Jakarta: Erlangga..

Neufert, Ernest. Data Arsitek. (2002) Jilid 2. Jakarta:Erlangga.

Time-Saver Standards for Interior Design and Space. Planning. New York: McGraw, 1987. Harris, Charles dkk.

Office Manajement Handbook (1958), Harry L. Wylie,

Standar Pelayanan Publik, Badan Standardisasi Nasional 2013

Peraturan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

PerBupNo.800/7108/SP/DPMPSTSP/20018

Permenpan RB (Permen Mepan RB) Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Website

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/mal-pelayanan-publik-suatu-perjalanan-pembaharuan>, 2019

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/mal-pelayanan-publik-suatu-perjalanan-pembaharuan>, 2019

<http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=mall-pelayanan-publik-sumedang-layani-351-layanan-publik>, 2019

<http://anisfatwa.blogspot.com/2014/04/materi-tentang-tata-ruang-kantor.html>, 2019

<https://www.blogernas.com/2016/07/teori-lingkaran-warna-brewster.html>, 2019